

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya "**Dokumen Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai**" sebagai Dokumen Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Perikanan Tahun 2018 - 2023 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sinjai Periode 2018 -2023.

Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan tahun 2019 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Sinjai terutama pada sektor perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sinjai.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga Dokumen Rencana Strategis ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sinjai.

Sinjai,

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sinjai

drh. AMINUDDIN ZAINUDDIN, MM

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI.....	 7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	7
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.....	 7
2.1.2 Uraian Tugas	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai).....	24
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)	27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.....	 50
2.4.1 Tantangan.....	50
2.4.2 Peluang	51
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	 52
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	 56
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	 61

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.....	61
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	64
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	70
3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.....	70
3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L.....	70
3.5.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kabupaten..	70
3.5.4 Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	71
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	 72
 BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	 74
5.1. Strategi.....	74
5.2. Kebijakan	75
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 78
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 87
 BAB VIII. PENUTUP	 90
8.1. Pedoman Transisi	90
8.2. Kaidah Pelaksanaan	90

DAFTAR TABEL

TABEL

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.....	25
---	----

TABEL

Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.....	25
--	----

TABEL

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Unit Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Keadaan Per 31 Desember 2018	22
---	----

TABEL

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.....	27
--	----

TABEL 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	36
---	----

TABEL

Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.....	43
---	----

TABEL 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	44
---	----

TABEL 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	54
--	----

TABEL 3.2

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakjil Kepala Daerah	60
---	----

TABEL 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra KKP RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	62
---	----

TABEL 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	63
---	----

TABEL 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	69
--	----

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	73
---	----

TABEL 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	76
--	----

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai.....	81
---	----

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	88
---	----

DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR 2.1	
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai; dan (4) Penetapan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dengan RPJMD, Renstra Kementerian / Lembaga terkait dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, dan Peraturan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, dan memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sinjai.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah, berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Masing-masing Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun.

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan pada Pemerintah Kabupaten Sinjai. RKPD secara teknis dan operasional memuat prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai;
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, sumber daya Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategis dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai pada Tahun 2018-2023 sebagai Komitmen untuk Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

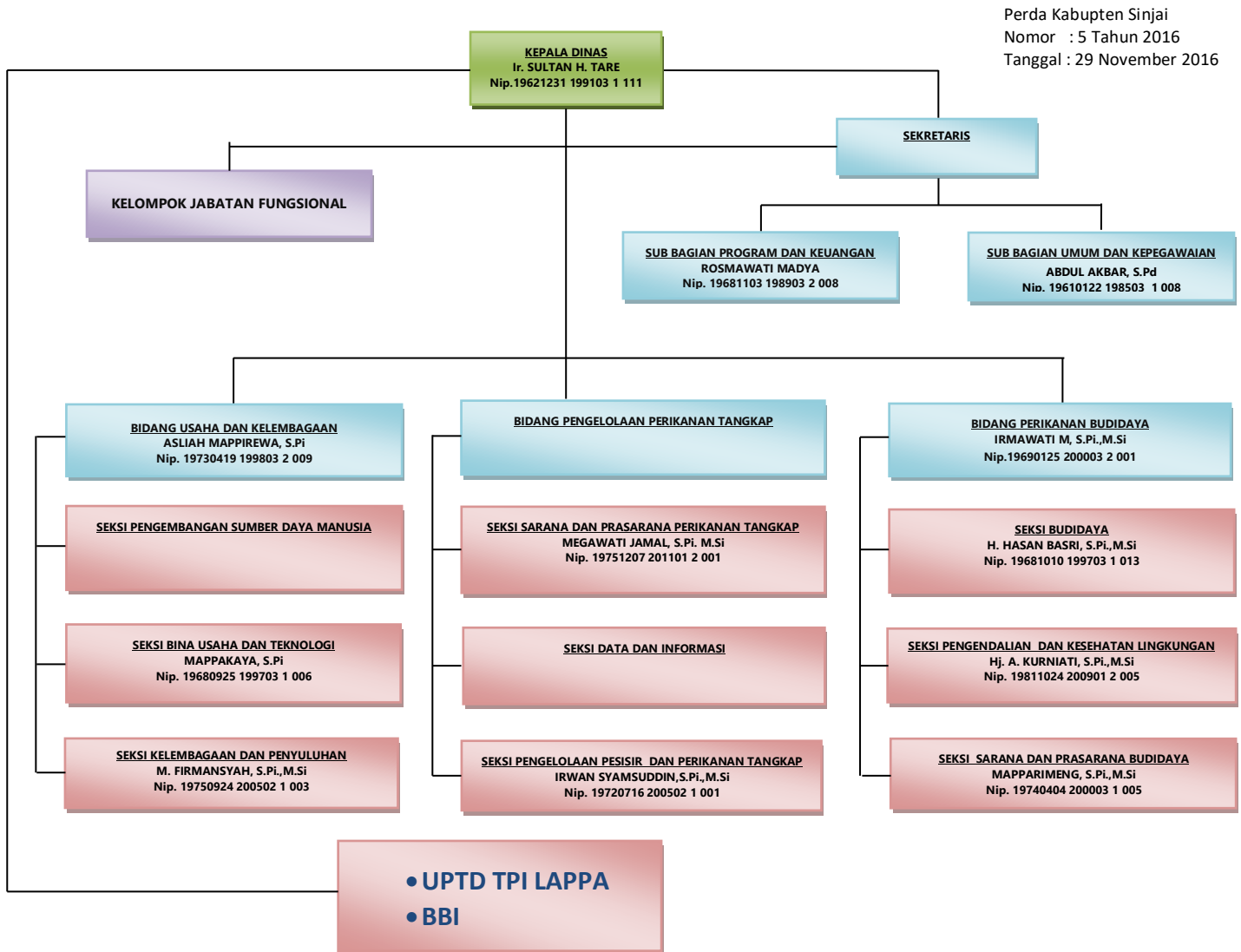
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap** terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Informasi
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 3. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap
- d. **Bidang Perikanan Budidaya**, terdiri dari :
 1. Seksi Perikanan Budidaya
 2. Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
- e. **Bidang Usaha dan Kelembagaan**, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
 3. Seksi Bina Usaha dan Teknologi
- f. **UPTD** terdiri dari :
 1. TPI Lappa
 2. BBI Dinas Perikanan

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan;
3. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
4. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

(a) *Sub Bagian Program dan Keuangan* :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;

4. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
5. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan dinas;
6. Menyusun laporan kinerja dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
7. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
8. Melaksanakan Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
9. Menyusun Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggungjawaban dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan Tugas Pokok organisasi guna mendukung kinerja Organisasi.

(b) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :*

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
4. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
5. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
6. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
7. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan dinas;
8. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan dinas;
9. Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai Tugas Pokok dan Fungsi di lingkup dinas;
10. Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Dinas;
11. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas

penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan meliputi Pengelolaan Pesisir, Data dan Informasi, Perikanan Tangkap dan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup

(a) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan rencana kegiatan dibidang tugasnya sesuai rencana dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
2. Merumuskan Kebijakan dibidang pengelolaan pesisir, data dan informasi, perikanan tangkap;
3. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan pesisir, data dan informasi perikanan tangkap;
4. Melaksanakan penyiapan rekomendasi untuk penerbitan surat izin;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan;
6. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan pesisir data dan informasi serta perikanan tangkap;
7. Melaksanakan evaluasi dan administrasi bidang pengelolaan perikanan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(b) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan kelengkapan sarana dan prasarana perikanan;
4. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pelayanan untuk Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
5. Melaksanakan monitoring pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
6. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(c) Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi;
3. Melakukan pengumpulan data statistik;
4. Menyusun penyajian data dan informasi data statistik;
5. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran perangkat daerah;
6. Melakukan pengolahan data dan analisis untuk pelaksanaan kegiatan;

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(d) Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan pembinaan pengelolaan perikanan tangkap;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan;
6. Menyusun rencana pemanfaatan ruang pengelolaan perikanan berdasarkan rencana zonasi;
7. Menyusun pengelolaan pesisir dan perikanan tangkap;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

d. Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Seksi Budidaya, Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan, dan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.

(a) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
2. Merumuskan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya, Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan dan Sarana dan Prasarana Budidaya;
3. Melaksanakan Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Budidaya;
4. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Budidaya, Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan dan Sarana dan Prasarana Budidaya;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(b) Seksi Budidaya mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Budidaya;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Budidaya;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan budidaya laut, budidaya air payau dan air tawar;

4. Menyusun rencana pengelolaan kawasan budidaya laut, budidaya air payau dan air tawar berdasarkan rencana zonasi;
5. Melakukan pembinaan kegiatan budidaya laut, budidaya air payau dan air tawar;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan untuk kegiatan Seksi Budidaya; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(c) Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan Budidaya mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan Budidaya;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan Budidaya;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pengendalian dan kesehatan lingkungan budidaya;
5. Melakukan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
6. Melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
7. Melakukan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan untuk pembudidayaan ikan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan Budidaya; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(d) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pelayanan serta pemberdayaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
5. Melakukan monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
6. Melakukan evaluasi serta pelaporan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

e. Bidang Usaha dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan sebagian tugas dinas, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya

ikan yang meliputi Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bina Usaha dan Teknologi, Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.

(a) Kepala Bidang Usaha Perikanan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan rencana kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
2. Melaksanakan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Melaksanakan kegiatan bina usaha dan teknologi;
4. Melaksanakan kegiatan kelembagaan dan penyuluhan;
5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan, dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia nelayan dan pembudidaya ikan;
5. Melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil;
6. Menyusun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia;

7. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(c) Seksi Bina Usaha dan Teknologi mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan Teknologi;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha dan Teknologi;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun rencana pengelolaan bina usaha dan teknologi;
5. Menyusun pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha;
6. Merancang pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
7. Melaksanakan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Penbudidaya Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(d) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
3. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan pembinaan nelayan kecil dan usaha pembudidayaan ikan;
5. Menyusun rencana pengelolaan kelembagaan dan penyuluhan;
6. Melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

1. TPI Lappa dan TPI Pembantu Tongke-Tongke

- (a) *Kepala UPTD* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Sinjai Utara dan Tempat Pelelangan Ikan Pembantu Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur.

Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
2. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
3. Mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (b) *Sub Bagian Tata Usaha* mempunyai uraian tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan lingkup UPTD;
 2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada UPTD;
 3. Mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta mengelola kartu kendali;
 4. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebendaharaan di lingkungan UPTD
 5. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
 6. Melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Membantu urusan gaji pegawai di lingkungan UPTD;
 8. Menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
 9. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
 10. Menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPTD; dan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Balai Benih Ikan (BBI) Palangka dan BBI Tassililu

(a) *Kepala UPTD* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan benih ikan

Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :

1. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Balai Benih Ikan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal Balai Benih Ikan;
4. Melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi lain yang menyangkut bidang teknologi pembenihan di daerah atas persetujuan Kepala Dinas;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(b) *Sub Bagian Tata Usaha* mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan lingkup UPTD;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada UPTD;
3. Mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar,

- memelihara naskah dinas dan kearsipan serta mengelola kartu kendali;
4. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebendaharaan di lingkungan UPTD
 5. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
 6. Melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Membantu urusan gaji pegawai di lingkungan UPTD;
 8. Menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
 9. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
 10. Menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPTD; dan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah personil yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai keadaan bulan Desember 2018 adalah 106 orang yang dapat dirinci sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Perikanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	2	-	2
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	2	1	41	7	51
4	D3	-	-	3	3	6
5	S1	12	5	9	11	37
6	S2	5	3	1	-	9
7	S3	-	-	-	-	-

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dan Non PNS sebanyak 106 orang. Jumlah Pegawai PNS sebanyak 28 orang, Non PNS 78 orang, dengan tingkat pendidikan terdiri dari SD 2 orang, SMP/ sederajat 1 orang, SMA/ sederajat sebanyak 51 orang, D3 6 orang, S1 37 orang dan S2 9 orang. Dengan komposisi demikian, maka secara tingkat pendidikan sudah memenuhi karena masih banyak yang berpendidikan SMA/ sederajat.

**Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas
Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	5	-	5
2	Golongan III	14	6	20
3	Golongan IV	1	2	3

Berdasarkan daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dengan status PNS sebanyak 28 orang. Golongan II sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 20 orang dan Golongan IV sebanyak 3 orang.

DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
UNIT ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI
KEADAAN PER 31 DESEMBER 2018

NO	NIP	NAMA	JK	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	GOL.	TMT	MASA KERJA		ESELON	JABATAN	TMT JABATAN
								TAHU N	BULAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19621231 199103 1 111	Ir. SULTAN H. TARE	L	Sinjai	31 Desember '1962	IV/c	01/04/2014	27	7	IIIc	Kepala Dinas	31/12/2016
2	19730419 199803 2 009	ASLIAH MAPPIREWA, S.Pi	P	Sinjai	19 April 1973'	IV/a	01/04/2014	19	9	IIIb	Kabid. Usaha dan Kelembagaan	31/12/2016
3	19690125 200003 2 002	IRMAWATI, S.Pi M.Si	P	Sinjai	25 Januari 1969'	IV/a	01/04/2016	17	9	IIIb	Kabid.Perikanan Budidaya	31/12/2016
4	19610122 198503 1 009	ABDUL AKBAR, S.Pd	L	Sinjai	22' Januari 1961	III/d	01/04/2005	34	8	IV/a	Kasubag Umum dan Kepegawaian	24/04/2018
5	19681103 198903 2 008	ROSMAWATI MADYA	P	Sinjai	03 Nopember 1968'	III/d	01/10/2017	23	9	IV/a	Kasubag. Program dan Keuangan	03/01/2017
6	19720716 200502 1 001	IRWAN SYAMSUDDIN, S.Pi M.Si	L	Sinjai	16 Juli 1972'	III/d	01/04/2017	19	7	IV/a	Kasi. Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	03/01/2017
7	19750924 200502 1 003	M. FIRMANSYAH, S.Pi. M.Si	L	Sinjai	24 September 1975'	III/d	01/04/2017	14	8	IV/a	Kasi. Kelembagaan dan Penyuluhan	03/01/2017
8	19630730 200604 1 005	MUHAMMAD YUSUF, SE	L	Sinjai	30 Juli 1963'	III/d	01/04/2017	22	7	IV/a	Kepala UPTD TPI Lappa	09/05/2017
9	19731026 200502 2 001	WAHIDAH, S.Pi	P	Sinjai	26 Oktober 1973'	III/d	01/04/2018	12	10		Analisis Potensi Pembenihan	
10	19770112 200604 1 017	MUHAMMAD IRFAN, S.Pi	L	Sinjai	12 Januari 1977'	III/d	01/04/2018	13	8		Penyusun Rencana Bahan Teknis Budidaya	
11	19740404 200003 1 005	MAPPARIMENG, S.Pi M.Si	P	Sinjai	04 April 1974'	III/c	01/10/2014	15	9	IV/a	Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya	02/08/2017
12	19681010 199703 1 013	H. HASAN BASRI, S.Pi M.Si	L	Bone	10 Oktober 1968'	III/c	01/04/2015	23	8	IV/a	Kasi Budidaya	03/01/2017
13	19680925 199703 1 006	MAPPAKAYA, S.Pi	L	Bone	25 September 1968'	III/c	01/04/2015	20	5	IV/a	Kasi Bina Usaha dan Teknologi	02/08/2017
14	19811024 200901 2 005	Hj. A. KURNIATI, S.Pi. M.Si	P	Sinjai	24 Oktober 1981'	III/c	01/04/2015	12	11	IV/a	Kasi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan	02/08/2017
15	19790913 200312 2 007	MARIANI, S.Pi	P	Sinjai	13 September 1979'	III/c	10/01/2017	12	11		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	
16	19751207 201101 2 001	MEGAWATI JAMAL, S.Pi.,M.Si	P	Sinjai	7 Desember 1975'	III/b	01/04/2015	11	11	IV/a	Kasi Sarana dan Prasarana Tangkap	02/08/2017
17	19850602 201001 2 036	ERWINDA MURDIANI, SE	P	U.Pandang	2 Juni 1985'	III/c	01/04/2014	8	0		Bendahara	
18	197710 201101 2 006	SRI INDIYANI, S.Pi	P	U.Pandang	06 Oktober 1977'	III/b	01/04/2015	7	0		Pengadministrasi Umum Kepegawaian	
19	19670307 200701 1 002	ABDULLAH, S.SOS	L	Sinjai	7 Maret 1967'	III/b	01/04/2016	12	8		Pengadministrasi Umum	
20	19710727 200604 1 016	ABDUL KARIM RASYID, S.Pi	L	Sinjai	27 Juli 1971'	III/b	01/10/2016	18	8		Analisis Kesehatan Ikan & Lingkungan	
21	19780721 200901 1 002	JAMALUDDIN SALEH, S.Pi	L	Bone	21 Juli 1978'	III/b	01/10/2016	11	1		Pengelola Sarana & Prasarana Tangkap	
22	19720516 200502 1 004	AGUSTANG. S.PKP	L	Bone	16 Mei 1972'	III/b	01/04/2017	15	5		Penyusun Program Anggaran & Laporan	
23	19820511 200901 1 004	ABD. RAZAK YUNUS, S.Pi	L	Sinjai	11 Mei 1982'	III/b	01/04/2017	11	7		Analisis Program dan Penyuluhan	
24	19761212 200701 1 014	IKBAL, S.Pi. Msi	L	Sinjai	12 Desember 1976'	III/b	10/04/2017	13	6		Pengolah Data	
25	19760119 200901 1 002	AMAL HASAN, S.Pi	L	Bone	19 Januari 1976'	III/a	01/10/2014	13	1		Analisis Kelautan	
26	19810101 200604 1 021	AMRI SAID, S.Pi	L	Sinjai	01 Januari 1981'	II/b	01/04/2010	10	9		Staf BBI Tassiliu	
27	19690517 200604 1 008	AKBAR NASIR	L	Sinjai	17 Mei 1969'	II/c	01/04/2018	17	9		Pengadministrasi Umum TPI Lappa	
28	19701231 201212 1 004	TASBIR	L	Sinjai	31 Desember 1970'	II/a	01/10/2017	17	11		Pengadministrasi Umum TPI Lappa	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Aset dan sarana kerja yang dimiliki Dinas perikanan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain :

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018

NO.	NAMA/JENIS BARANG	MEREK/TYPE	THN	SAT	KEADAAN BARANG	KET.
1	Tambak	Luas 17,500 M ²	1945			BBI Tassililu S. Barat
2	Tanah Empang	Luas 179,350 M ²	1993			Tanah Empang Cilellang, Samataring Kec. S.Timur
3	Tanah Kolam Ikan	Luas 995 M ²	1999			Tanah Kolam Ikan Kel. Tassililu Kec. S. Barat
4	Tanah Balai Benih Ikan	Luas 20000 M ²	2007			Tanah Balai Benih Ikan Desa Palangka Kec. S. Selatan
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Luas 811 M ²	1976			Tanah Bangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	5,100 M ²	1976			Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan Tongke-Tongke
7	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	15,925 M ²	1983			Pelelangan Ikan TPI Lappa
8	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	48 M ²	2001			Bangunan Pos Retribusi Lappa (Mutasi dari Bapenda)
9	Tanah jalan Masuk BBI Palangka	300 M ²	2009			Tanah Jalan Masuk BBI Palangka Kec. S. Selatan
10	Meja ½ Biro	-	1995	Buah	KB	R. Penyuluh
11	Meja Biro		1998	Buah	KB	R. UK
12	Meja Biro		1999	Buah	B	R. PP. Tangkap Ros, Hidayatullah
13	Meja Rapat Panjang		1999	Buah	B	R. Pertemuan
14	Meja ½ Biro		1999	Buah	KB	Pos. Peng. Lappa
15	Wireless	TENS	2000	Buah	B	R. Kadis
16	Meja ½ Biro		2000	Buah	B	R. B.Daya (Saeva), R.Keu (Jumria)
17	Lemari	2 Pintu	2001	Buah	B	R. Sekretaris
18	Meja Biro		2002	Buah	B	Pos Pengawasan
19	Lemari Kayu		2002	Buah	B	R. Pertemuan
20	Kursi Lipat	Chitose	2002	Buah	B	UPP
21	Meja ½ Biro		2002	Buah	B	R. Budidaya (Hj. Kurni)

22	Meja ½ Biro		2003	Buah	B	R.Keu (Uspar), R.UK (Bahari), Pos Peng.Lappa, R.PP Tangkap(Megawati)
23	Kursi Besi/Metal	Chitose	2003	Buah	B	R.Budidaya
24	Lemari Es	Uchida	2003	Buah	B	R. Kadis
25	Wireless	TOA	2003	Buah	B	R.Pertemuan
26	Rak Buku		2003	Buah	B	R. Tangkap
27	Meja Biro		2004	Buah	B	UPP Pulau IX
28	Pipa Kolam		2004	Buah	B	BBI Palangka
29	Kursi Tamu		2005	Set	B	Dinas Lantai 2
30	Meja Biro		2005	Buah	B	R. Kadis
31	Buffet Kayu	1 Pintu	2005	Buah	B	R. Kadis
32	Meja ½ Biro		2005	Buah	B	Pos.Peng. Lappa
33	Meja ½ Biro		2005	Buah	B	R.B.Daya (P.Amir), R.Penyuluh 2 (P.Udin,Rosmah), R.UK (Tarni), Pos. Peng.Lappa
34	Kursi Besi/Metal	Chitose	2006	Buah	B	R. Kadis 2, R.Sekretaris 7, Pos.Peg. Lappa 8, R.Pertemuan 22, R.Keu 4, R.PP.Tangkap 6, R.B.Daya 3, R.UK 6
35	Tiang Bendera		2006	Buah	B	Halaman Diskan
36	Televisi	Panasonic	2006	Unit	B	BBI Palangka
37	Rak Televisi		2006	Buah	B	R. Kadis
38	Meja ½ Biro		2006	Buah	B	R.Sek 2 (Ros,Kosong), R.B.Daya 1 (Karim), R. UK 1 (M.kaya), R.Tangkap 1 (Irwan Syam), R.Keu 1 (Ida), R.Penyuluh 2,
39	Meja Biro		2006	Buah	B	R. Tangkap 1 (Akbar Badong), R. B.Daya 1 (Irmawati)
40	Lemari Kayu	3 Pintu	2006	Buah	B	R. Sekretaris
41	Lemari Kayu ½ Badan		2006	Buah	B	R. Sekretaris
42	Meja Pertemuan		2006	Buah	B	R.Pertemuan
43	Meja ½ Biro		2007	Buah	B	R. Budidaya 3 (Mappa, H.Hasan, Mariani), R. UK 2 (Subandi, Firman), R. Sek 1 (Umra)
44	Lemari Buku	3 Pintu	2007	Buah	B	R. Budidaya 1, R. Tangkap 1, Pos TPI Lappa 1
45	Lemari Gantung (Kitchen Set)		2007	Buah	B	R. Sek 1, R. Penyuluh 2

46	AC Unit	Panasonic	2007	Unit	B	R. Kadis R. Pertemuan
47	TV 29 Inch	Panasonic	2007	Unit	KB	R. Penyuluh
48	LCD (Proyektor)	Toshiba	2007	Unit	B	R. Sek (Lemari)
49	Tape Recorder	LG	2007	Unit	B	R. Kadis
50	Meja ½ Biro		2007	Buah	B	Pos Pengawas 2
51	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3 Pintu	2007	Buah	B	R. UK
52	Kursi Tamu		2007	Set	B	R. Kadis
53	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)		2007	Buah	B	BBI Tassililu
54	Meja Makan		2007	Buah	B	R. Kadis
55	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 D	2007	Unit	B	Abd. Razak Yunus
56	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 D	2007	Unit	B	Hj. Kurniati
57	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 D	2007	Unit	B	Abd. Karim Rasyid
58	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 D	2007	Unit	B	Megawati Jamal
50	Handy Talky	Alianco	2008	Unit	B	Pengawasan
51	Meja Komputer	Ligna	2008	Buah	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
52	Rak Buku	2 Pintu	2008	Buah	B	BBI Palangka
53	Meja ½ Biro	Olympic	2008	Buah	B	Kelompok Siswasmas
54	Handy Talky	Kenwood	2008	Unit	B	BBI Palangka
55	Analytical Balance		2008	Unit	B	BBI Palangka
56	Microscope Binocular		2008	Unit	B	BBI Palangka
57	Autoclave		2008	Buah	B	BBI Palangka
58	Dissecting Microscope		2008	Buah	B	BBI Palangka
59	Refractometer		2008	Buah	B	BBI Palangka
60	Tractor Tangan dengan Perlengkapan		2008	Buah	B	BBI Palangka
61	Kaca Pembesar		2008	Buah	B	BBI Palangka
62	Alat Hipophysasi		2008	Set	B	BBI Palangka
63	Gelas Ukur		2008	Buah	B	BBI Palangka
64	Freezer		2008	Unit	B	BBI Palangka
65	Gergaji Bor		2008	Buah	B	BBI Palangka
66	Happa Pemijahan		2008	Buah	B	BBI Palangka
67	Happa Pematang Gonad		2008	Buah	B	BBI Palangka
68	Layar in Focus		2008	Unit	B	R. Pertemuan
69	Meja Biro	Olympic	2008	Buah	B	UPP
70	Meja ½ Biro		2008	Buah	B	BBI Palangka
71	Taplak Meja		2008	Buah	B	R. Pertemuan
72	Dispenser	Miyako	2008	Buah	B	BBI Palangka
73	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2008	Unit	B	Wahidah
74	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2008	Unit	B	M. Irfan

75	Pick Up	Toyota/Hilux Pick up 20 L	2008	Unit	B	Mapparimeng
76	Taplak Meja		2009	Buah	B	R. Pertemuan
77	Tangga Aluminium 2 m		2009	Buah	B	R. Pertemuan
78	Tangga Aluminium 5 m		2009	Buah	B	R. Pertemuan
79	Monitor Flat	Inforce	2009	Unit	B	R. Budidaya
80	Kursi Kerja	Chitoce	2009	Buah	B	R. Pertemuan
81	Meja Kerja		2009	Buah	B	R. Budidaya 1 (Muh. Irfan) R. Tangkap 1 (Fajri)
82	Meja Rapat		2009	Buah	B	UPP
83	Kursi Kerja	Futura	2009	Buah	B	UPP
84	Kursi Rapat		2009	Buah	B	R. Pertemuan 11 R. Kadis 1
85	Tempat Tidur		2009	Buah	KB	R. Kadis 7 R. Pertemuan 10 RB. 3
86	Sofa		2009	Set	B	UPP
87	Lemari		2009	Buah	B	Kadis
88	White Board		2009	Buah	B	R. Pertemuan
89	Televisi	Sharp Pico	2009	Unit	KB	R. Kadis
90	Wireless	TOA	2009	Buah	B	-
91	Alat Dapur Lainnya		2009	Set	KB	UPP
92	Camera Digital		2010	Unit	B	Penyuluh
93	Sound System		2010	Unit	B	Penyuluh
94	White Board		2010	Buah	B	Penyuluh
95	Rak Buku		2010	Buah	B	R. Kadis 1 R. Penyuluh 1
96	Excavator	Komatsu	2010	Unit	B	Samsuri
97	PH Meter		2010	Unit	B	Penyuluh
98	DO Meter		2010	Unit	B	Penyuluh
99	Refractometer		2010	Buah	B	Penyuluh
100	Thermometer		2010	Unit	B	Penyuluh
101	Salinometer		2010	Buah	B	Penyuluh
102	Handy Talky		2010	Unit	B	Penyuluh
103	Sepeda Motor	Jupiter MX/50c	2011	Unit	B	Sri Indriyani
104	Crawler Excavator	Komatsu PC130F-7	2011	Unit	B	Samsuri
105	Laptop	Sony SPE 141A18	2012	Unit	B	A.Irmawati, Erwinda, RB
106	Laptop	HP Pavilion 6.4	2012	Unit	B	Ir. Sultan, Muh. Ansar, M.Firmansyah, Mariani
107	Sepeda Motor	Jupiter Z/1DY	2012	Unit	B	Ir. Sultan
108	Sepeda Motor	Jupiter Z/1DY	2012	Unit	B	Amri Said
109	Sepeda Motor	Jupiter MX/50c	2012	Unit	B	Ikbil

110	Sepeda Motor	Jupiter MX/50c	2012	Unit	B	M. Firmansyah
111	Note Book	Asus 1225C	2012	Unit	B	Muh. Yusuf
112	Printer Dotmatrix + Kabel Printer USB	Epson Dotmatrix	2013	Buah	B	R. Keuangan
113	Meja Rapat Panjang		2013	Buah	B	R.Pertemuan Lappa
114	Kursi Rapat	Napoli	2013	Buah	B	R.Pertemuan Lappa
115	Tirai/Gorden		2013	Set	B	R.Pertemuan Lappa
116	Speaker		2013	Unit	B	R.Pertemuan Lappa
117	Amplifier		2013	Unit	B	R.Pertemuan Lappa
118	Microphone		2013	Buah	B	R.Pertemuan Lappa
119	Multi-Parameter Water Quality Meters	Horiba U - 526	2013	Unit	B	R. Budidaya (Hj. Kurni)
120	Tirai/Gorden		2013	Set	B	Diskan
121	Meja Biro		2013	Buah	B	R. UK (Asliah, S.Pi)
122	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2013	Buah	B	R. Kadis
123	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	A. Nurhidayat
124	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Abdullah, S.Sos
125	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Amal Ahsan, S.Pi
126	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Agustang, S.PKP
127	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Irwan Syamsuddin
128	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Mapparimeng
129	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Akbar Badong
130	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Unit	B	Mappakaya
131	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	Unit	B	H. Hasan Basri
132	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	Unit	B	Erwinda Murdiani
133	Pick Up	Mitsubishi Strada Triton Single Cabin	2013	Unit	B	A. Muh. Ansar
134	Meja Rias		2014	Buah	B	R. Pertemuan Lappa
135	Layar LCD Proyektor		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
136	Tempat Tidur (Queen Size)		2014	Buah	B	R. Pertemuan Lappa
137	Tempat Tidur (King Size)		2014	Buah	B	R. Pertemuan Lappa
138	LCD Proyektor		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
139	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		2014	Buah	B	Pos Pengawasan Lappa
140	Televisi		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
141	Ceiling Fan		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
142	Lemari Pakaian		2014	Buah	B	R. Pertemuan Lappa
143	AC Unit		2014	Unit	B	R. Pertemuan Lappa
144	Meja Biro		2014	Buah	B	R. Penyuluh
145	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indachi	2014	Buah	B	R. Sek, R.B.Daya, R. Tangkap, R. Penyuluhan
146	Note Book	Lenovo 640-	2014	Unit	B	Irwan Syamsuddin

		70				Mappakaya
147	Printer	3 in 1 Epson L210	2014	Buah	B	R. Sekretaris
148	Printer	Epson L120	2014	Buah	B	BBI Palangka, R. Keuangan 1
149	Camera Digital	Nikon	2014	Unit	B	Munawir
150	Note Book	Lenovo	2014	Unit	B	Amal Ahsan
151	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Mariani
152	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Asliah Mappirewa
153	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Rosmawati M
154	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Ahmad Aryanto
155	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Miftahul Khair
156	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	A. Ashryani
157	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Syafruddin
158	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Astiani Achmad
159	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Emil Salim
160	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Bahria
161	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Irmawati M
162	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Jamaluddin Saleh
163	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Subandi
164	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	M. Aspar Nurdin
165	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Jumain
166	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2014	Unit	B	Fatmawati
167	Sepeda Motor Roda Tiga	Kaisar Triseda	2014	Unit	B	Amri Said
168	Lemari Laboratorium		2015	Buah	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
169	Meja ½ Biro		2015	Buah	B	BBI Palangka 2, BBI Tassililu
170	Tempat Tidur Susun		2015	Buah	B	BBI Palangka 4, BBI Tassililu 4
171	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis		2015	Buah	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
172	Kursi Kerja		2015	Buah	B	BBI Palangka 6, BBI Tassililu 6

173	Laptop	HP	2015	Unit	B	Subandi
174	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 Pintu	2015	Buah	B	R. Sekretaris
175	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indachi	2015	Buah	B	R. Penyuluh
176	PC Unit	Dekstop Axioo	2015	Unit	B	BBI Palangka
177	Printer	Canon Pixma IP2770	2015	Buah	B	BBI Tasililu
178	Meja Rapat		2015	Buah	B	BBI Palangka 2, BBI Tassililu 2
179	Mesin Utama	SPEKTA	2015	Unit	B	Pengolahan Lappa
180	Blowe Portable	SPEKTA	2015	Unit	B	Pengolahan Lappa
181	Disk Mill	SPEKTA	2015	Unit	B	Pengolahan Lappa
182	Flexible Portable	SPEKTA	2015	Unit	B	Pengolahan Lappa
183	Cool Box		2015	Buah	B	Dinas Kelautan (Hibah Dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KKP)
184	Mobil Bak Terbuka	Toyota All New Hilux 2.5 S-Cab 4x2 Desel	2015	Unit	B	Dinas Kelautan (Hibah Dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KKP) Amal Ahsan
185	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain2	Toyota Dyna 110 ST P/S	2015	Unit	B	Dinas Kelautan (Hibah Dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KKP) Asliah Mappirewa
186	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2015	Unit	B	Dinas Perikanan (Mutasi Dari Dinas Ketahanan Pangan) Budiyaamin
187	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2015	Unit	B	Dinas Perikanan (Mutasi Dari Dinas Ketahanan Pangan) Mardania
188	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2015	Unit	B	Dinas Perikanan (Mutasi Dari Dinas Ketahanan Pangan) Rosmah
189	Printer	Canon MP237	2015	Unit	B	Mutasi dari Bapenda (TPI Lappa)
190	Televisi LED	Sharp	2016	Unit	B	Mutasi dari Bapenda (TPI Lappa)
191	AC Unit	Midea	2016	Unit	B	R. Pertemuan
192	Dispenser	Royal/RCS 2211WH	2016	Buah	B	R. Sekretaris
193	Note Book	HP BCM943142Y	2016	Unit	B	Megawati Jamal
194	Printer Kartu Nelayan	HID Fargo	2016	Buah	B	Lemari Sek.
195	Printer	Epson WT100	2016	Buah	B	Lemari Sek
196	Sound System	BMB DA 2000	2016	Unit	B	R. Pertemuan
197	Kursi Kerja Eseleon IV	Informa	2016	Buah	B	R. Sek 3, R. B.Daya 3, R. Penyuluh 3, R. UK 3, R. Tangkap 3,

198	Lemari Arsip	3 Pintu	2016	Buah	B	R. Tangkap 1, R. Penyuluh 1
199	Laptop	Lenovo G-40	2016	Unit	B	Penyuluh
200	Printer	Canon Pixma IP2770	2016	Buah	B	Penyuluh
201	Digital PH Meter	PO Meter PH 009 (I), Pen	2016	Unit	B	Penyuluh
202	Alat Ukur PH Meter	Soil PH Tester	2016	Set	B	Penyuluh
203	Sound System Wireless	FLT-888 U	2016	Buah	B	R. Kadis
204	Proyektor Portable	LITZ LED	2016	Unit	B	Penyuluh
205	Kamera Digital	Nikon CoolPix S	2016	Unit	B	Penyuluh 9, Rosmawati 1
206	Laptop	HP Spektra 13-V022TU	2016	Unit	B	Rosmawati Madya
207	Sepeda Motor	Suzuki Adress Racing 110 CC	2016	Unit	B	Dinas Perikanan (Mutasi Dari Bapenda) Muh. Yusuf, SE
208	Laptop	Asus	2016	Unit	B	Mapparimeng
209	Printer	Epson L120	2016	Unit	B	R. Budidaya
210	Sound System	Amplifier ZA 230 W	2016	Unit	B	TPI Lappa
211	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	Toyota Rush S M/T 1.5 TRD Sportivo Ultimo	2017	Unit	B	Ir. Sultan H. Tare
212	Lemari Arsip	3 Pintu	2017	Buah	B	R. Budidaya
213	Freezer	Sharp	2017	Unit	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
214	Microskop	Yazumi	2017	Unit	B	R. Budidaya
215	Tabung Oksigen		2017	Unit	B	BBI Palangka, BBI Tassililu
216	Kursi Tamu		2017	Set	B	UPT TPI Lappa
217	Meja		2017	Buah	B	UPT TPI Lappa
218	Lemari Arsip	3 Pintu	2017	Unit	B	UPT TPI Lappa
219	Mesin Pompa Air	Honda GP160	2018	Unit	B	UPT TPI Lappa
220	Pompa Celup	SAN-EI 3SEP0,5 HP	2018	Unit	B	BBI Palangka
221	Pompa Celup	SAN-EI 750 AB	2018	Unit	B	BBI Tassililu
222	Kipas Angin	Sekai 1ST 1851	2018	Unit	B	R. Sek, R. Per. B.Daya, R.Peng.Per.Tangkap
223	PC Unit	Acer Aspire TC-708	2018	Unit	B	BBI Tassililu
224	Laptop	Asus ROG GL 503VD-GZ294T	2018	Unit	B	H. Ahmad Arianto, HS, SE
225	Printer	Epson L120	2018	Unit	B	R.B.Daya, R.PUK, R.Peng.Per.Tangkap
226	Meja Kerja	Kayu Jati	2018	Buah	B	R. Sek, UPTD TPI Lappa

227	Mesin Absensi	FingerSpot Mesin Absensi Revo DUO- 158 BNC	2018	Unit	B	R. Sekretaris
228	Printer	Epson L120	2018	Unit	B	Pos Pengawasan Lappa
229	Printer 3 in 1	Epson L360	2018	Unit	B	Pos Pengawasan Lappa
230	Microphone	TOA	2018	Buah	B	TPI Lappa
231	Lemari Kaca	Kaca/Aluminiu m	2018	Buah	B	Pos Pengawasan Lappa
232	Laptop	HP 14- bs740TU (4QA75PA)	2018	Buah	B	R. Sekretaris

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sinjai dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai sedangkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai diatur dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016. Tugas pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2014 – 2018 urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB				16,31	17,22	17,22	18,46	19,38	16,31	17,22	17,22	18,46	19,38	100	100	100	100	100
2	Produksi Perikanan				58.089	58.390	60.421	62.222	64.278	58.820,04	59.580,4	67.087,3	77.268,2	75.723,2	101	102	111	124	118
3	Konsumsi Ikan				76	76	76	77	47	76	76	76	77	47	100	100	100	100	100
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan				27,59	35,48	38,57	46,67	50,00	27,59	35,48	38,57	46,67	16,77	100	100	100	100	34
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan				0,28	0,38	0,67	0,84	21,55	0,28	0,38	0,67	0,84	21,55	100	100	100	100	100
6	Nilai Tukar Nelayan																		
7	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan																		
8	Volume Produksi Perikanan				58.089	58.390	60.421	62.222	64.278	58.820,04	59.580,4	67.087,3	77.268,2	75.723,2	101	102	111	124	118
9	Penyelesaian dan Penyidikan dan Tindak Pidana Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus)				3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	100	100	100	100	100
10	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kab/Tahun)				76	76	76	77	47	76	76	76	77	47	100	100	100	100	100
11	Tenaga Kerja Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Orang)				3.879	5.917	5.956	5.999	6.010	14.910	15.000	15.185	15.332	15.450	384	254	255	256	257
12	Cakupan Bina Kelompok				27,59	35,48	38,57	46,67	50,00	0	0	0	16,43	16,77	0	0	0	35	34

	Nelayan (%)																		
13	Produksi Ikan Kelompok Nelayan Yang Dibina Terhadap Total Produksi (%)				0,28	0,38	0,67	0,84	0,93	0,02	0,04	0,04	6,67		7	11	6	794	0
14	Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Kualitas Dalam Pelayanan (Orang)				33	34	34	34	36	33	34	34	34	36	100	100	100	100	100
15	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				28.499	29.326	29.906	30.095	30.546	29.230	39.972,10	36.287,70	38.378,8	34.508,0	103	136	121	128	113
16	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp)				356.236.800.000	361.580.300.000	368.811.800.000	376.188.000.000	381.830.700.000	401.728.025.000	484.028.275.000	500.721.306.000	512.675.409.000	451.854.450.000	113	134	136	136	118
17	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Sarana Penanganan Ikan (Unit)				10	54	30	85	85	4	27	15			40	50	50	0	0
18	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan (Paket)				0	8	40	40	45			35			0	0	88	0	0
19	Jumlah Kapal Penangkap Ikan Yang Memenuhi Standar Laik Laut < 5 GT (Unit)				17	10	15	20	20	10	10	10	25	19	59	100	67	125	95
20	Jumlah Kapal Penangkap Ikan Yang Memenuhi Standar Laik Laut < 10 GT (Unit)				0	3	0	2	2		3				0	100	0	0	0
21	Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang Dibangun (Paket)				1	0	2	2	2	1		1	2	100	0	50	0	0	100

22	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan di Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (paket)				3	1	1	3	3	1	12	2			33	1,20	200	0	0
23	Jumlah Sertifikat Usaha Peningkatan Kehidupan (Persil)				0	100	100	100	100	100	100	100		100	0	100	100	0	100
24	Volume Produksi Budidaya Perikanan (Ton)				29.590,00	29.064	30.515	32.127	33.732	25.590,04	19.608,30	30.799,6	38.889,40	41.215,2	86	67	101	121	122
25	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (RP)				74.770.400.000	159.860.400.000	167.885.400.000	176.710.000.000	185.525.000.000	74.710.800.000	43.572.200.000	63.515.210.000	81.435.895.000	94.788.060.000	100	27	38	46	51
26	Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan Yang Dikembangkan (Paket)				3	2	2	2	2	1	2	2	2	3	33	100	100	100	150
27	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Laut (Paket)				8	0	5	5	7	8	31	15			100	0	300	0	0
28	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Payau (Paket)				2	2	2	2	2		5	9	1	19	0	250	450	50	950
29	Jumlah Sarana dan Parasarana Kawasan Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum (Paket)				0	1	0	1	1	1	1		25	14	0	100	0	2.500	1.400
30	Jumlah Sertifikat Usaha Pembudidayaan Ikan (Persil)				100	100	100	100	100		50	100		100	0	50	100	0	100
31	Jumlah SDM Budidaya Yang Terlatih (Orang)				0	150	70	70	70		100			80	0	67	0	0	114
32	Jumlah Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kali)				12	36	36	36	36	12	1				100	3	0	0	0
33	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)				12	4	10	10	14		4	10			0	100	100	0	0

34	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (Paket)				0	390	200	200	200		100	200	200	200	0	26	100	100	100
35	Jumlah Pameran Produk Hasil-Hasil Perikanan (Kali)				0	5	5	5	5		5	5	5	5	0	100	100	100	100
36	Jumlah Tenaga Kerja Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Yang Dibina dan Dikembangkan (Orang)				50	50	50	50	50	30	50	50	50	50	60	100	100	100	100
37	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
38	Peningkatan Pelayanan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Aparatur (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
39	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor				40	40	40	45	45	40	40	40	45	45	100	100	100	100	100
40	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor				8	8	8	10	10	8	8	8	10	10	100	100	100	100	100
42	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor				12	5	8	8	8	12	5	8	8	8	100	100	100	100	100
42	Peningkatan Pelayanan Bahan Bacaan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
43	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
44	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Operasional Kantor				21	21	36	36	36	21	21	36	36	36	100	100	100	100	100

45	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur (Paket)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
46	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur (Unit)				1	3	2	3	3	1	3	2	3	3	100	100	100	100	100
47	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur (Unit)				3	3	5	5		3	3	5			100	100	100	0	0
48	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur (Unit)				7	2	18	18	18	7	2	18	18	18	100	100	100	100	100
49	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				0	7	7	7	7	0	7	7	7	7	0	100	100	100	100
50	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				12	40	45	45	45	12	40	45	45	45	100	100	100	100	100
51	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				5	5	7	7	7	5	5	7	7	7	100	100	100	100	100
52	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				0	5	8	8	8	0	5	8	8	8	0	100	100	100	100
53	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana (Unit)				1	2	0	1	1	1	2	0	1	1	100	100	0	100	100
54	Penimngkatan dan Pengembangan Disiplin Aparatur (Orang)				35	0	98	100	100	35	0	98	100	100	100	0	100	100	100
55	Pelayanan dan Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai (Buah)				0	0	64	60	60	0	0	64	60	60	0	0	100	100	100
56	Pelayanan dan Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai (Buah)				35	0	34	40	40	35	0	34	40	40	100	0	100	100	100
57	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Orang)				7	5	5	6	7	7	5	5	6	7	100	100	100	100	100
58	Peningkatan Kompetensi				4	4	3	5	3	4	4	3	5	3	100	100	100	100	100

	Sumberdaya Aparatur (Kali)																		
59	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur (Kali)				0	0	5	1	1	0	0	5	1	1	0	0	100	100	100
60	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dokumen)				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
61	Peningkatan dan Pengembangan Capaian Kinerja SKPD (Dokumen)				0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100
62	Peningkatan Pelayanan Sistem Pelaporan Keuangan dan Anggaran (Bulan)				0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	100	100	100	100
63	Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan Terbaru (Bulan)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Berdasarkan pada tabel 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai selama masa Renstra tahun 2014 - 2018, masih ada beberapa indikator yang belum tercapai antara lain :

1. Jumlah alat bantu penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan ramah lingkungan (Unit).

Belum tercapainya target pengadaan alat bantu penangkapan disebabkan beberapa faktor yang sangat terbatas setiap tahunnya dan masih banyak kegiatan yang lebih diprioritaskan.

2. Persentase peningkatan cakupan bina kelompok nelayan masih sangat rendah karna data yang belum lengkap dan belum akurat sehingga mempengaruhi hasil perhitungan persentase peningkatan cakupan bina kelompok nelayan.

3. Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun (kg)

Persentase tercapainya tingkat konsumsi ikan Kabupaten Sinjai disebabkan produksi ikan memenuhi target, distribusi kepada masyarakat merata dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sudah bagus dan promosi gerakan makan ikan semakin gencar.

4. Produksi perikanan budidaya (ton)

Presentatse target produksi perikanan budidaya sudah memenuhi target disebabkan beberapa faktor, antara lain harga rumput laut kembali normal sehingga minat masyarakat pembudidaya cukup bagus, tingkat salinitas air ditambah dan dilaut serta pasokan air baik budidaya air payau maupun air tawar sudah bagus, meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan, didukung dengan adanya pendampingan penyuluh dan penyuluh bantu.

6. Produksi perikanan tangkap (ton) melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan, hasil produksi perikanan tangkap yang cukup bagus, kapasitas SDM nelayan sudah cukup bagus , sarana prasarana yang sudah mendukung.

**Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2018 – 2023**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi capaian target Indikator		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi komoditi Perikanan	ton/tahun	77.268	75.723	78.818	82.047	85.416	88.430	92.047	426.758

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 apabila dilihat dari segi realisasi pagu anggaran guna mendukung ketercapaian target kinerja dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

Tabel 2-2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	17.292.000	29.892.000	29.820.000	38.820.000	42.000.000	16.121.512	26.067.918	26.241.207	31.026.501	31.274.344	93	87	88	80	74	0,41	0,26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.650.000	14.150.000	14.650.000	14.650.000	16.150.000	8.889.000	10.953.020	11.764.695	14.526.625	13.174.795	61	77	80	99	82	0,12	0,20
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.280.000	4.455.000	6.210.000	6.357.000	11.440.000	5.280.000	4.455.000	6.210.000	6.357.000	11.440.000	100	100	100	100	100	0,70	0,70
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.170.000					4.050.000					78						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1.440.000	4.185.000	1.515.000	1.515.000	4.129.000	1.440.000	4.185.000	1.515.000	1.515.000	3.829.000	100	100	100	100	93	(0,97)	(0,99)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.430.000	4.500.000	4.500.000	5.700.000	8.000.000	2.405.000	4.495.000	4.470.000	5.630.000	6.790.000	99	100	99	99	85	0,61	0,49
Pelayanan Administrasi Ketatausahaan/Kesekretariatan	61.941.000	68.075.500	77.929.500	104.921.475	133.291.625	61.661.360	68.075.500	77.929.500	104.921.475	132.241.625	100	100	100	100	99	13,14	0,61
Pengelolaan Keuangan SKPD	57.113.000	71.732.000	79.722.000	87.650.000	42.898.582	56.563.000	69.382.000	79.722.000	87.250.000	42.898.582	99	97	100	100	100	(0,80)	(0,77)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	199.022.000	193.045.000	212.781.137	193.146.232	283.000.000	191.959.500	192.707.073	188.960.000	192.977.357	275.340.302	96	100	89	100	97	0,30	0,30
Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS				54.000	648.000				13.500	148.500				25	23	(0,04)	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas				262.900.000					262.900.000					100			
Penyediaan Administrasi DAK Tahun 2014	55.650.000					48.292.000					87						
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.000.000	22.049.500	27.199.700		10.296.000	8.000.000	22.049.500	27.199.700		10.296.000	100	100	100		100	(1,24)	(1,24)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.950.000	16.590.000	48.403.300		53.735.000	14.176.868	16.590.000	48.403.300		49.981.400	95	100	100		93	0,79	0,74
Pengadaan Meubeleur	17.300.000	5.940.000	45.487.860	20.500.000	18.980.000	17.270.000	5.940.000	45.487.860	20.432.000	18.980.000	100	100	100	100	100	(0,91)	(0,91)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	88.100.000	112.357.200	118.000.00 0	146.056.000	119.806.00 0	68.200.000	103.072.164	117.162.00 0	141.804.000	111.066.93 5	77	92	99	97	93	0,07	0,10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		6.326.000	6.326.000	18.364.000	28.350.000		6.326.000	6.326.000	18.364.000	28.350.000		100	100	100	100	1,01	1,01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			2.500.000	2.500.000	4.000.000			2.500.000	2.500.000	4.000.000			100	100	100	0,38	0,38
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		4.600.000	4.600.000	6.900.000	4.800.000		4.560.000	4.600.000	6.900.000	4.800.000		99	100	100	100	(0,1)	(0,1)
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	20.125.000	26.693.000				20.115.824	26.165.000				100	98				0,25	0,23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pabrik																	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	12.250.000		15.640.000	29.440.000		12.250.000		15.640.000	29.440.000		100		100	100		0,58	0,58
Pendidikan dan Pelatihan Formal	91.000.000	28.950.000	62.125.000	48.000.000	16.084.000	59.749.400	27.530.000	62.125.000	37.826.000	1.084.000	66	95	100	79	7	(2,28)	(34,3)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.128.000	9.305.000	8.482.500	8.240.000		4.128.000	9.305.000	8.482.500	8.240.000		100	100	100	100	0,06	0,1
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	18.300.000					17.650.000					96						
Penyusunan Renstra SKPD	13.450.000					13.415.000					100						
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	10.000.000					10.000.000					100						
Penyusunan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	9.350.000	12.621.300	21.775.000	18.752.500		9.072.000	12.621.300	21.775.000	18.352.500		97	100	100	98		0,35	0,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		18.655.000	38.065.000	48.035.000	53.075.000		18.630.000	38.015.000	47.945.000	52.892.888		100	100	100	100	0,47	0,47
Optimalisasi Operasional Pengelolaan TPI				416.627.000	307.471.00 0				386.089.800	307.471.00 0				93	100	(0,36)	(0,26)
Pembangunan Jalan Kampung/Desa Pesisir DAK Tahun 2014	1.256.738.00 0	311.720.000				1.256.349.25 0	311.401.000				100	100				(3,03)	(3,03)
Pengembangan Pusat Rehabilitasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM)		49.200.000	77.900.000				49.000.000	77.100.000				100	99			0,37	0,36
Pembuatan Tambatan Perahu/Kapal DAK Tahun 2014	304.911.200					304.597.000					100						
Pembuatan Sarana Air Bersih DAK Tahun 2014	571.906.000					571.580.000					100						
Gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan	37.540.000	53.220.000	42.850.000			36.210.400	53.200.000	42.775.000			96	100	100			(0,09)	(0,08)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan			190.412.00 0					189.930.00 0					100				
Pengembangan Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan			35.954.000					35.954.000					100				

Pengolah Serta POKMASWAS																	
Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan DAK Tahun 2015		209.603.000					209.363.000					100					
Pengadaan Sarana Komunikasi Pengawasan (DAK 2015)		52.770.000					52.770.000					100					
Sosialisasi Perda Zonasi Pesisir		10.750.000					10.750.000					100					
Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak DAK Tahun 2013	594.445.000	390.340.000				594.117.850	389.979.000				100	100				(0,52)	(0,52)
Pengadaan Sarana Pendukung BBI DAK Tahun 2015		90.459.200					89.894.200					99					
Pengembangan Budidaya Air Tawar	30.200.000		32.480.000	33.480.000	81.983.000	30.199.280		32.340.000	33.330.000	81.885.000	100		100	100	100	0,64	0,64
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan			340.160.000	1.570.221.000	721.764.000			339.777.000	1.518.523.250	699.867.000			100	97	97	(0,78)	(0,78)
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Laut			451.725.000					451.427.000					100				
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Air Payau			685.246.000					683.495.800					100				
Pengembangan Budidaya Laut			140.000.000					138.825.500					99				
Pembuatan Lantai Jemur Rumput Laut DAK Tahun 2014	411.670.000					411.400.000					100						
Penyediaan Keramba Jaring Apung DAK Tahun 2014	226.492.000					226.313.250					100						
Penyediaan Kendaraan Roda Tiga Distribusi Induk dan Benih BBI DAK Tahun 2014	32.150.000					32.150.000					100						
Pengembangan Jalan Produksi DAK Tahun 2014	791.464.002	430.506.500				789.997.000	429.304.000				100	100				(0,84)	(0,84)
Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan Budidaya	54.675.000					54.292.600					99						
Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak DAK Tahun 2014	319.854.130					319.607.127					100						
Pembuatan Alat Bantu Berupa Rumpon DAK Tahun 2014	453.100.000	685.396.008				452.602.250	685.090.000				100	100				0,34	0,34
Penyediaan Kapal Motor < 5 GT	243.925.000					243.888.000					100						
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan	46.200.000					46.200.000					100						
Penyediaan Sampan	180.000.000	165.045.000				178.643.300	165.045.000				99	100				(0,09)	(0,08)
Penyediaan Perlengkapan dan Meubeleur PPI Lappa	71.167.123					71.167.123					100						

Penyediaan Kendaraan Roda Dua Operasional Penyuluh DAK 2014	250.360.000	79.200.000				250.138.000	77.020.000				100	97				(2,16)	(2,25)
PM Peralatan Survey, Pengolahan, Penyimpanan Data Statistik	23.342.000				17.935.000	23.339.250				17.885.000	100				100	(0,30)	(0,30)
Penyediaan Kendaraan Roda Dua Petugas Statistik	31.097.000					30.430.000					98						
Bimtek Pembuatan Jelly dan Stik Rumput Laut	8.725.000					8.717.000					100						
Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Pembudidaya Ikan	39.000.000	34.825.000		25.975.000		34.556.000	31.695.000		25.140.000		89	91		97		(0,40)	(0,31)
Percontohan Budidaya				737.224.000	600.726.000				724.996.600	597.599.200				98	99	(0,23)	(0,21)
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau			32.500.000	198.813.000				32.450.000	198.699.000				100	100		0,84	0,84
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan				11.000.000	5.725.500				11.000.000	5.193.500				100	91	(0,92)	(1,12)
Rehabilitasi Pembangunan Pintu Air				50.000.000	68.515.000				49.843.000	68.494.000				100	100	0,27	0,27
Workshop Pengembangan Budidaya Rumput Laut Chaulerpa Sp (Lawi-Lawi)					18.129.000					18.129.000					100		
Workshop Pengembangan Pakan Mandiri					25.340.000					24.977.000					99		
Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan					421.950.000					417.951.500					99		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Nelayan					609.672.000					594.855.000					98		
Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan (PENAS)				63.100.000					63.100.000					100			
Lomba Masak Serba Ikan				21.000.000	13.000.000				11.643.000	13.000.000				55	100	(0,62)	0,10
Bimtek Cara Budidaya Ikan Yang Baik		22.150.000					21.765.000					98					
Pembangunan Sarana Prasarana UPR DAK Tahun 2015		93.830.000					93.810.000					100					
Pengadaan Bibit Udang dan Bandeng		53.750.000					53.350.000					99					
Bimtek Cara Pembenihan Ikan Yang Baik		8.250.000					8.250.000					100					
Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar		50.248.000					50.248.000					100					
Pengadaan Bibit Rumput Laut		59.764.008					59.614.000					100					

Pengadaan Bibit Ikan Laut		92.880.000					92.803.000					100				
Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Yang Diizinkan DAK Tahun 2015		370.886.000					370.751.000					100				
Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Pembudidaya Ikan			30.125.000					28.473.751					95			
Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Skala Kecil		10.750.000	11.784.000	15.550.000			10.500.000	10.149.000	10.200.000			98	86	66	0,29	(0,01)
Sosialisasi dan Pendampingan Asuransi Nelayan				19.250.000					15.260.000					79		
Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan Di Atas Kapal			597.551.000					597.550.500					100			
Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan			674.935.000					674.275.914					100			
Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan < 5GT			164.615.000					164.615.000					100			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan		163.450.000					163.450.000					100				
Pembuatan Kapal Penangkapan Ikan DAK Tahun 2015		1.475.836.000					1.474.462.901					100				
Pengadaan Cool Box DAK Tahun 2015		381.231.310					381.231.300					100				
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan			8.000.000					7.150.000					89			
Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan		21.000.000	34.000.000	25.000.000	27.000.000		19.940.000	33.645.000	19.614.000	22.767.000		95	99	78	84	(0,16) (0,44)
Bimtek Pengolahan Hasil Perikanan					10.569.000					10.387.000					98	
Bimtek Penanganan Hasil Tangkapan Ikan Di Atas Kapal					12.262.000					12.262.000					100	
Bimtek Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Perikanan Berbasis Partecipatori Rural Appraisal (PRA)					13.870.000					13.868.000					100	
Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningkatan Mutu Serta Pemasaran Hasil Perikanan			13.484.000	50.200.000				12.884.000	47.570.000				96	95		0,73 0,73

Peningkatan Sarana Peningkatan Mutu				95.712.000					95.712.000					100			
Pengadaan Sampan Fiber				200.000.000					192.150.000					96			
Pengadaan Sarana Penjemuran hasil Perikanan DAK Tahun 2015		34.419.320					34.419.300					100					
Lomba Kelompok Pengolahan		11.550.000					11.550.000					100					
Rehabilitasi Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan DAK Tahun 2015		60.652.000					60.544.000					100					
Pengadaan Peralatan Pengolahan dan Pemasaran DAK Tahun 2015		197.920.000					197.682.500					100					
Pengadaan Peralatan Pengolahan Sederhana Bangsal Pengolahan DAK Tahun 2015		50.817.000					50.667.000					100					
Bimtek Kelompok Pengolahan Hasil Laut dan Pengolahan		11.885.000					11.885.000					100					

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik. Hanya ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak merata meskipun itu sudah direncanakan tetapi tidak dianggarkan setiap tahun karena anggaran yang sangat terbatas, meskipun itu seharusnya dilaksanakan secara berkesinambungan, pada tahun 2017 dan tahun 2018 ada kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) non PNS itu hanya teralisasi (25 %) dan (23 %) hal itu disebabkan karna keterlambatan pencairan dan hanya bisa dicairkan pada triwulan IV.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

2.4.1. Tantangan

1. Menurunnya stok SDI di Laut.
2. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia perikanan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan.
4. Belum lengkapnya regulasi dari KKP RI yang menunjang peraturan perundang-undangan tentang perikanan.
5. Kurangnya distribusi dan pasokan hasil produksi perikanan ke seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.
6. Masih adanya pelaku usaha perikanan yang belum memiliki ijin.
7. Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha perikanan.

2.4.2. Peluang

1. Besarnya potensi sumberdaya perikanan.
2. Adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pembangunan perikanan
3. Banyaknya pedagang pengecer yang memasarkan hasil perikanan.
4. Adanya lembaga yang menangani perijinan usaha perikanan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
- 2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Belum terjadwal dengan baik siklus perencanaan.
- 4) Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
- 5) Masih kurangnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan dan aset maupun pelaksana dilapangan.

b. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

- 1) Masih adanya pelaku usaha perikanan yang belum memiliki izin usaha perikanan.
- 2) Kurangnya promosi produk-produk unggulan hasil perikanan.
- 3) Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap akses permodalan.
- 4) Masih kurangnya sarana prasarana pengolahan produk hasil perikanan.
- 5) Masih adanya produk hasil perikanan yang diolah belum menggunakan standar alat dan prosedur kelayakan pengolahan hasil perikanan.
- 6) Kurang tersedianya benih dan induk ikan unggul.

- 7) Masih adanya pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang belum memiliki sertifikat (kompetensi dan cara budidaya).
- 8) Belum optimalnya pengendalian hama dan penyakit ikan.
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan.
- 10) Kurangnya pengetahuan, keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.
- 11) Adanya perubahan data bidang perikanan.
- 12) Masih terbatasnya sarana dan prasarana di Pendaratan Ikan.
- 13) Masih terbatasnya sarana penangkapan ikan.
- 14) Belum optimalnya pengelolaan PPI.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya biaya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya • Terbatasnya akses permodalan • Adanya kesenjangan pendapatan masyarakat perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan, keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan • Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang perikanan • Belum adanya regulasi dari KKP yang menunjang perauran perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan • Terbatasnya sarana prasarana perikanan
2	Rendahnya produktivitas perikanan tangkap, budidaya dan usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya produksi perikanan tangkap • Rendahnya produksi perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan, keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan • Terbatasnya pengetahuan nelayan tentang tanda-tanda cuaca, <i>fishing ground</i> • Terbatasnya sarana prasarana perikanan

			<ul style="list-style-type: none"> • Kurang tersedianya benih dan induk ikan unggul
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya pelaku utama dan elaku usaha perikanan yang belum memiliki sertifikat (kompetensi dan cara budidaya) • Terbatasnya dukungan terhadap perlindungan pelaku usaha perikanan
3	Rendahnya kuantitas produk olahan Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terselenggaranya program pembinaan kegiatan pengembangan kelembagaan dan usaha pelaku utama usaha perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masi rendahnya produktifitas usaha kelompok pelaku usaha utama • Masih rendahnya kemampuan manajerial kelompok pelaku usaha • Masih rendahnya inovasi dan kualitas • Masih rendahnya akses modal pelaku usaha dalam peningkatan usahanya

Kualitas

c. Masalah eksternal yang mempengaruhi kelautan dan perikanan sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan
- 2) Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan
- 3) Keterbatasan infrastruktur perikanan baik budidaya, tangkap maupun pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga dan keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023. Visi pembangunan Kabupaten Sinjai berdasarkan analisis visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”

Adapun maksud dari VISI tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Terwujudnya, memiliki makna bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber dayasecara efektif dan efisien, Untuk dapat merealisasikan, maka perlu dilakukan melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersinergitas antar seluruh aparatur Pemerintah Daerah kabupaten Sinjai mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Bahkan sampai struktur

pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) serta partisipasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melalui upaya tersebut, tujuan dan sasaran akhir yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai dapat terwujud secara optimal.

Mandiri, bermakna bahwa upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sinjai melalui dukungan penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreatifitas dan produktivitas agar lebih produktif dan berdaya saing yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.

Berkeadilan, mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang dan diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masalah upaya untuk menciptakan serta menumbuhkan yarakat, teratasinya masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs)

Religius, adalah upaya untuk menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagaman dan spritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas sebagai upaya utnuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur,

toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagaman sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tenteram.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan dan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Unggul dan Berdaya Saing, kondisi dimana kemajuan fisik infrastruktur daerah, kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat berada pada capaian yang dapat dipersandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan VISI tersebut di atas, maka dirumuskan pula MISI sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim

yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Meningkatkan peran Kabupaten Sinjai secara lebih efektif guna menjadikan Kabupaten Sinjai sebagai Pusat Pelayanan di Provinsi Sulawesi Selatan utamanya dalam bidang AGAMA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, EKONOMI KERAKYATAN, INFORMASI DAN TRANSPORTASI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Menata kelembagaan ekonomi masyarakat agar mempunyai daya saing dengan mendorong iklim berusaha dan investasi yang kondusif dalam menopang perekonomian daerah
10. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mendukung pencapaian misi 3 **yaitu** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Kelompok-Kelompok Masyarakat Dalam Berkembangnya Iklim Usaha dan Investasi Serta Pemanfaatan Pendapatan Daerah Secara tepat, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan sasaran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yaitu meningkatnya produksi komoditi perikanan dan kuantitas produk olahan hasil perikanan dengan indikator sasaran Jumlah produksi

perikanan, cakupan bina kelompok nelayan, konsumsi ikan perkapita, produksi perikanan kelompok nelayan, jumlah produk hasil olahan perikanan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel-3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Daerah
Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Kelompok-Kelompok Masyarakat Dalam Berkembangnya Iklim Usaha dan Investasi Serta Pemanfaatan Pendapatan Daerah Daerah Secara Tepat	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya tingkat produksi tangkap dan perikanan budidaya serta produk olahan hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Sinjai 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan usaha perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, budidaya dan meningkatkan produksi hasil olahan hasil kelautan dan perikanan

2	Tujuan : Meningkatkan pendapatan masyarakat	•	• Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan sektor perikanan	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan stakeholder bidang kelautan dan perikanan
3	Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat	• Belum optimalnya cakupan pembinaan kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan	• Belum adanya regulasi dari KKP yang menunjang peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan	• Adanya kebijakan kepala daerah untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan sektor perikanan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Adapun tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
2. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel-3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai
berdasarkan Sasaran Renstra KKP RI beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra KKP RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Perikanan • Terbatasnya kompetensi SDM Perikanan Dalam Penerapan Teknologi Perikanan • Terbatasnya Akses Permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Anggaran Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Perikanan • Terbatasnya SDM Yang Kompeten di Bidang Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Potensi Sumberdaya Perikanan (SDA dan SDM) • Adanya Kebijakan Daerah Yang Mendukung Pengembangan Sektor Perikanan • Adanya Situasi Wilayah Yang Kondusif

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum visi pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel-3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Produktifitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah • Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana pendukung masih Terbatas. • Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi sistem produksi • Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor

2.	Program Pendukung 1. Peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan 2. Penerapan Mutu Pengembangan Usaha dan Daya Saing	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolahan serta kesenjangan gender dalam kelembagaan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan masih kurangnya kelompok nelayan dalam bentuk koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Rekstruturisasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
		<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada ponggawa 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya informasi akses perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi terkait kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sehingga dapat dengan mudah akses pada perbankan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah

pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sistem jasa penunjang (*supporting institution*) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing.

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032, Rencana pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan budidaya nasional dengan sektor unggulan Perikanan meliputi :

1. Kawasan Andalan Darat

- a. Kawasan Andalan Budidaya Air Payau
- b. Kawasan Andalan Budidaya Air Tawar

2. Kawasan Andalan Laut

- a. Kawasan Andalan Laut Pasiloangnge dan sekitarnya
- b. Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya

3. Kawasan potensil yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Dimanfaatkan untuk budidaya unggulan meliputi :

- a. Kawasan potensil budidaya Rumput Laut
- b. Kawasan potensil perikanan tangkap Teluk Bone

4. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam
- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakar; dan
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan atau mencemari ekosistem bakau.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam
- b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasah ketat
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti
- d. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan untuk pariwisata bahari
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air

5. Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk pemukiman pembudidaya dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah
- b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan hijau
- c. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya
- b. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan industri

Kabupaten Sinjai memiliki sumber daya pesisir yang cukup potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, kepelabuhan, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (Integrated Coastal Management) dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum dilaksanakan secara optimal.

Wilayah pesisir Teluk Bone telah membentuk budaya tradisional masyarakat yang telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dengan mengelola sumberdaya pesisir yang mencakup berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria.

Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan.

Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir Teluk Bone di Kab. Sinjai bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya. Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan :

1. Meningkatnya degradasi ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir dengan meningkatnya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman
2. Penangkapan ikan

Perkiraan dampak negatif dan positif faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan dimana saat ini ekosistem dominan diwilayah pesisir Teluk Bone seperti :

1. Kondisi terumbu karang masih cukup baik sampai rusak berat.
2. Pada umumnya kerusakan tersebut hancur akibat masih maraknya kegiatan ilegal fishing dan pola penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan sehingga sejumlah habitat lainnya yang berada disekitar kawasan lokasi penangkapan ikanpun ikut rusak.

3. Masih terdapat terumbu karang yang dapat diselamatkan. Hal tersebut disebabkan karena lokasinya berada daerah pesisir yang dilindungi pemerintah sehingga akses masyarakat terbatas pada lokasi – lokasi tersebut.

Tabel-3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sinjai	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Kawasan			
2	Produksi Perikanan (ton)			
	a. Perikanan Tangkap	Struktur dan kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional Mata pencaharian nelayan bergantung pada SDA laut dan perairan umum 	Pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan melalui restrukturisasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
	b. Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Irigasi terbatas Pemanfaatan Lahan yang tidak sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> Pola budidaya masih tradisional Kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi Lahan Perikanan Budidaya Dukungan Pembiayaan Penetapan Kawasan Minapolitan
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Zonasi Kawasan dan Ruang untuk sektor unggulan perikanan belum terakomodir Sistem Logistik Ikan 	Belum tersosialisasinya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan Regulasi kebijakan seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya Penataan perencanaan dan sinergitas antar lintas sektor

Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dikhawatirkan ketergantungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat laut pun diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya pada nelayan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis , maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai ditinjau dari :

3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Pelayanan Dinas Perikanan dalam rangka peningkatan jumlah produksi perikanan dan peningkatan produk hasil olahan hasil perikanan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan didukung oleh beberapa unit kerja seperti UPTD BBI Dinas Perikanan dan UPTD PPI Lappa.

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Strategis pada Renstra K/L yaitu Pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin dengan sasaran target selama lima tahun yaitu :

1. Produksi perikanan sebesar 18,49 juta ton
2. Konsumsi ikan per kapita sebesar 35,14 kg/kapita/tahun
3. Volume produk olahan hasil perikanan sebesar 5,0 juta ton

3.5.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kabupaten

1. Peningkatan Produksi Perikanan tahun 2014 sebesar 58.088,99 ton menjadi 64.278,46 ton pada tahun 2018
2. Konsumsi ikan perkapita tahun 2014 sebesar 76 menjadi 77 kg/kapita/thn pada Tahun 2018

3.5.4 Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan industrialisasi dan kawasan minapolitan, maka kawasan dikembangkan melalui :

- a) Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (*cluster*).
- b) Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- c) Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
- d) Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Indikator Tujuan : Persentase kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya produksi komoditi perikanan dan meningkatnya kuantitas dan kualitas produk olahan hasil perikanan.

Indikator Sasaran adalah Jumlah produksi perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan tangkap.

Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang baik.

Indikator Tujuan : Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Indikator Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah terwujudnya integrasi Perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik .

Secara rincian tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi komoditi perikanan	KONTRIBUSI PDRB TERHADAP SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	20,35	21,37	22,44	23,56	24,74
			VOLUME PRODUKSI PERIKANAN (TON)	78.818	80.047	85.416	88.430	92.074
			KOMSUMSI IKAN PERKAPITA (Kg/ Kap/Thn)	47	47	47	48	48
			CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN (%)	17,11	17,45	17,79	18,14	18,50
			PRODUKSI PERIKANAN KELOMPOK NELAYAN (%)	21,98	22,41	22,85	23,31	23,78
		Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Hasil Perikanan	JUMLAH PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN (TON)	1.448	1.476	1.505	1.535	1.565

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya produksi komoditi perikanan adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan
2. Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang memadai
3. Fasilitasi akses permodalan bagi nelayan dan pembudidaya
4. Peningkatan kesadaran nelayan dan pembudidaya dalam pengelolaan sumberdaya ikan
5. Penggunaan teknologi tepat guna

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kuantitas produk olahan hasil perikanan adalah :

1. Pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan
2. Peningkatan sarpras pengolah dan pemasar hasil perikanan
3. Memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan

Sedangkan strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah adalah :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur.
3. Penyediaan sarana prasarana yang memadai.
4. Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan / Rehabilitasi sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya
2. Jaminan perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan
3. penerapan teknologi tepat guna
4. Pembinaan / pelatihan terhadap pelaku usaha perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan
6. Gerakan Memasyarakatkan makan ikan
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dinas dengan fokus pada pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan pelaporan kinerja, penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan kompetensi aparatur serta pengelolaan keuangan.

Tabel-5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Kelompok-Kelompok Masyarakat Dalam Berkembangnya Iklim Usaha dan Investasi Serta Pemanfaatan Pendapatan Daerah Secara Tepat.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	1 Meningkatkan Produksi Komoditi Perikanan	1 Peningkatan kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan 2 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang memadai 3 Fasilitasi akses permodalan bagi nelayan dan pembudidaya 4 Peningkatan kesadaran nelayan dan pembudidaya dalam pengelolaan sumberdaya ikan 5 Penggunaan teknologi tepat guna	1 Pembangunan / Rehabilitasi sarpras perikanan tangkap dan perikanan budidaya 2 Jaminan perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan 3 Penerapan Teknologi Tepat Guna 4 Pembinaan / pelatihan terhadap pelaku usaha perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan 5 Peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan

	2 Meningkatkan Kuantitas Produk Olahan Hasil Perikanan	1 Pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan 2 Peningkatan sarpras pengolah dan pemasar hasil perikanan 3 Memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	6 Gerakan memasyarakatkan makan ikan 7 Meningkatkan kualitas pelayanan dinas dengan fokus pada pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan pelaporan kinerja, penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan kompetensi aparatur serta pengelolaan keuangan
	3 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2 Peningkatan kapasitas SDM aparatur 3 Penyediaan sarana prasarana yang memadai 4 Pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset perangkat daerah yang akuntabel	

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahun dalam RPJMD . Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan diluar prioritas tetap dilaksanakan dengan penekanan strategis lebih rendah, dimaksudkan agar semua program program operasional pada semua OPD terlaksana untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan selama tahun 2019 – 2023 diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1. Pengadaan Kapal Penangkapan ikan < 3 GT
2. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan
3. Pengadaant Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan
4. Pengadaan Sumur Bor untuk TPI
5. Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan di TPI yang Higenis
6. Sosialisasi Asuransi Nelayan
7. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan skala kecil
8. Penyusunan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
9. Operasional Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
10. Studi Komperatif untuk TPI Higenis

B. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1. Pengembangan Benih Ikan bagi Pokdakan
2. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
3. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
4. Pendampingan asuransi pembudidaya ikan
5. Pengadaan mesin pembuat pakan ikan buatan (mesin pelet)
6. Pembinaan, Sosialisasi dan Pemenuhan Sertifikasi CBIB dan CPIB
7. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar
8. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau

9. Percontohan Budidaya
10. Pengembangan Jalan Produksi
11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut
12. Penyediaan Biaya Operasional BBI
13. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan dan kalibrasi alat ukur
14. Pembangunan / Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPTD BBI
15. Identifikasi Kelompok Usaha Perikanan (SeHATKan)
16. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan di Kawasan Budidaya
17. Pengembangan Budidaya Rumput Laut untuk Pokdakan

C. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
2. Pameran dan Promosi Kelautan Dan Perikanan
3. Lomba Masak Serba Ikan
4. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
5. Pengembangan SDM, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Serta Pemasaran Hasil Perikanan

D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
6. Pelayanan Adminitrsai ketata usahaan
7. Pengelolaan Keuangan SKPD
8. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

10. Pengadaan peralatan gedung kantor
11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12. Pengadaan Meubeler
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkalan peralatan gedung kantor
16. Pengadaan pakaian dinas harian dan atribut
17. Bimtek
18. Penyediaan Jasa Kecelekaan Kerja (JKK) Non PNS

E. Program Pelaporan Kinerja

1. Penyusunan Laporan Kinerja
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang baik	Sasaran terwujudnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik				Program Pelayanan Perkantoran	Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas dalam pelayanan	B	B		B		B		B		B		Dinas Perikanan	Kab. Sinjai		
					1. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.	Peningkatan pelayanan jasa komunikasi dan SDA (Bln)	60	12	66.000.000	12	77.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	398.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional (Unit)	49	49	17.350.000	49	20.000.000	49	25.000.000	49	25.000.000	49	27.000.000	49	114.350.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					3.Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor (Unit)	26	8	8.300.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	12.000.000	12	12.000.000	44	52.300.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					4.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor (Unit)	41	10	2.929.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	50	14.929.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					5.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan (Bln)	60	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	60	42.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					6.Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor (Bln)	60	12	148.570.227	12	150.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	60	768.570.227	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					7.Pengelolaan Keuangan SKPD	Peningkatan pelayanan pelaporan keuangan dan anggaran (Bln)	60	12	50.990.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	60	300.990.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					8.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya rapat rapat koordinasi dan konsultasi (Bln)	60	12	249.600.000	12	250.000.000	12	270.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	60	1.419.600.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
			9.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Unit)	12	1	700.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	13	180.700.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai		

				10. Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	45	4	26.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	24	226.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				11. Penambahan daya instalasi listrik				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		17.500.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				11. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Paket)	3			2	160.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	8	670.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				12. Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	32			3	40.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	2	70.000.000	11	205.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Unit)	49	47	163.698.000	47	175.000.000	47	180.000.000	47	180.000.000	47	160.000.000	235	858.698.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Unit)	8	8	7.000.000	8	7.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	8	160.000.000	40	190.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Unit)	30	10	4.000.000	15	6.000.000	15	7.000.000	20	8.000.000	20	10.000.000	80	35.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				16. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya	Tersedianya pakaian dinas harian lengkap dengan atributnya (Pasang)	120			60	33.000.000				60	39.000.000	120	72.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
				17. Pengembangan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor	tersedianya fasilitas gedung kantor yang memadai .	1 Paket			1	100.000.000			1	120.000.000	1	120.000.000	3	340.000.000		
				18. Bimtek	Tersedianya biaya untuk pelaksanaan Bimtek (Kali)	12	3	30.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	15	250.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
		19. Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Tersedianya jasa untuk jaminan kecelakaan kerja (Bln)	12	12	162.000	12	162.000	12	162.000	12	162.000	12	162.000	60	810.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai		
Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang baik	Sasaran terwujudnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik			Program Pelaporan Kinerja		B	B		B		B		B					Dinas Perikanan		
				1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja OPD (Dokumen)	5 dokumen	1	6.440.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	5	48.440.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
				2. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya pelaporan keuangan dan Perencanaan (Dokumen)	35 dokumen	7	60.702.500	7	65.000.000	7	65.000.000	7	70.000.000	7	75.000.000	35	335.702.500	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai

Tujuan : Meningkatkan kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Sasaran 1 Meningkatnya produksi komoditi perikanan				Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.508	35.534		36.609		37.707		38.838		40.003		188.691				
					1. Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan < 3 GT	Tersedianya Kapal Penangkap Ikan < 3 GT (Unit)	82	25	878.660.000	25	875.000.000	25	875.000.000	30	1.110.000.000	30	1.110.000.000		4.848.660.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
					2. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Tersedianya alat bantu penangkapan ikan (Unit)	46	71	247.700.000	75	255.000.000	75	255.000.000	75	255.000.000	75	255.000.000	371	1.267.700.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
					3. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Tersediannya Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan (Paket)	35	20	250.000.000	20	255.000.000	20	230.000.000	20	235.000.000	20	240.000.000	100	1.210.000.000		Kab. Sinjai	
					4. Pengadaan sumur bor	Terpenuhinya kebutuhan air bersih di TPI (Paket)	-			1	200.000.000							1	200.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
					5. Pengadaan Sarana pemasaran ikan di TPI yang higienis	Tersediannya Sarana pemasaran ikan yang higienis di TPI (Unit)	-			5	175.000.000	5	185.000.000	5	195.000.000	5	200.000.000	20	755.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
					6. Sosialisasi Asuransi nelayan dan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)	Terlaksananya Sosialisasi Asuransi Nelayan (Orang)		50	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	250	125.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
					7. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan usaha penangkapan skala kecil	Jumlah sertifikat usaha untuk nelayan (Persil)	300 persil	50	13.596.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	17.000.000	50	18.000.000	250	78.596.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
					8. Penyusunan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	Tersedianya data Statistik kelautan dan perikanan yang Baik dan Akurat (Dokumen)	50 dok	10	19.175.000	10	30.000.000	12	32.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	56	156.175.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
					9. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya pengelolaan TPI (Bln)	60 bulan	12	297.041.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000	60	1.557.041.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
			10. Studi komperatif untuk TPI higienis	Terlaksananya studi Komperatif untuk TPI Higienis (orang)				25	175.000.000							25	175.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai			
Tujuan : Meningkatkan kontribusi	Sasaran 1 Meningkatnya produksi komoditi				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	41.215,2	43.275		45.438		47.709		49.592		52.071		238.085				

Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	perikanan				1. Pengembangan Benih Ikan Bagi Pokdakan	Tersedianya Benih Ikan Bagi Pokdakan (Klp)	20 Klp			10	100.000.000	10	110.000.000	10	121.000.000	10	130.000.000	40	461.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					2. Pengembangan Sarana Budidaya rumput laut	Tersedianya Sarana dan Prasarana budidaya rumput laut	Klp	5	57.140.000	7	60.000.000	8	62.500.000	10	65.000.000	10	67.500.000	40	312.140.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					3. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Tersedianya Induk dan Pakan Untuk BBI (Paket)	Paket			3	30.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	3	33.000.000	8	95.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					4. Pembuatan lantai jemur rumput laut	Tersedianya tempat penjemuran rumput laut	Paket	1	88.600.000	1	90.000.000	1	92.000.000	1	95.000.000	1	97.000.000	5	462.600.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					5. Pengembangan Balai Benih Ikan	Tersedianya bibit ikan air tawar	Paket	2	61.500.000	2	62.000.000	2	65.000.000	2	67.000.000	2	70.000.000	10	325.500.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					6. Pengembangan Budidaya Laut	Tersedianya bibit rumput laut	kg	10.000	57.000.000	10.000	60.000.000	10.000	62.000.000	10.000	65.000.000	10.000	70.000.000	50.000	314.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Tersedianya sarana dan prasarana	200 Paket	34	645.640.000	35	650.000.000	35	670.000.000	35	690.000.000	35	700.000.000	174	3.355.640.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					8. Magang Tenaga teknis dan petugas operasional	Terlaksananya Pendampingan pada Kelompok Pembudidaya Ikan (Klp)	Paket					1	32.000.000			1	33.000.000	2	65.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					9. Pendampingan Asuransi Pembudidaya Ikan	Terlaksananya Pendampingan Asuransi Pembudidaya Ikan (Org)				50	10.000.000	50	11.000.000	50	12.000.000	50	13.000.000	200	46.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					10. Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan	Tersedianya Mesin Pembuat Pakan Ikan Untuk BBI (Paket)				1	200.000.000	1	220.000.000					2	420.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					11. Pembinaan dan Pemenuhan Sertifikat CBIB	Terlaksananya Pendampingan Pemberkasan dan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi CBIB untuk diusulkan ke Propinsi (Orang)				50	15.000.000	50	16.000.000	50	17.000.000	50	18.000.000	200	66.000.000		Kab. Sinjai
					12. Penyediaan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (Klp)				5	50.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	20	260.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					13. Penyediaan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau (Klp)	Klpk.			5	50.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	20	260.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai

			14. Pengembangan jalan produksi	Tersedianya Jalan Produksi (Paket)	1.500 meter			1	250.000.000	1	250.000.000			1	300.000.000	3	800.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
			15. Penyediaan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut (Lantai Jemur) (Klp)	10 Paket			2	200.000.000					2	250.000.000	4	450.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
			16. Penyediaan Sarana Budidaya rumput laut	Tersedianya sarana budidaya rumput laut	5 paket			1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	240.000.000		
			17. Perbaikan Konstruksi Tambak Pemda Sinjai	Tersedianya Konstruksi tambak Pemda	Paket					1	350.000.000			1	350.000.000	2	700.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
			18. Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/fibreglas, happa, selang kanulasi, ovaprin/HC G, syringe/alat suntik, kakaban, larutan NaCl/infus, aquabides)	Tersedianya Paket Pemijahan Buatan (Paket)	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
			19. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Terlaksananya Oembinan dan Pemantauan Kesehatan Ikan Kualitas Air dan OIKB (Klp)		20	6.700.000	20	7.500.000	20	7.500.000	20	7.500.000	20	7.500.000	100	36.700.000		
			20. Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI (Paket)				1	250.000.000	1	350.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	4	950.000.000		
			21. Identifikasi Kelompok Usaha Perikanan (sehatkan)	Terlaksananya pendampingan sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan (Persil)				50	10.000.000			50	10.000.000			100	20.000.000		
			22. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan di Kawasan Budidaya	Terlaksananya Pelatihan Perikanan Budidaya (Orang)				25	175.000.000							25	175.000.000		
			23. Pengembangan Bibit Rumput laut Untuk Pokdakan	Tersedianya Bibit Rumput Laut (Klp)				10	75.000.000	10	80.000.000	10	85.000.000	10	100.000.000	40	340.000.000		
			24. Pembangunan sarana dan prasarana Pokok unit Pembenihan (UPTD BBI)	Tersedianya sarana dan prasarana Pokok unit pembenihan (UPTD BBI)	Paket			3	500.000.000			1	500.000.000			4	1.000.000.000		
Tujuan : Meningkatkan kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	Sasaran Meningkatkan Kuantitas Produk Olahan Hasil Perikanan		Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Meningkatnya industri hasil laut dan tambak	1.420	1.448		1.476		1.505		1.535		1.565		7.529			

Terhadap PDRB					1. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan (Unit)	100 unit		30	150.000.000	30	155.000.000	30	160.000.000	30	165.000.000	120	630.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai	
					2. Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya pameran dan promosi kelautan dan perikanan (kali)	11 kali	3	26.332.908	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	15	176.332.908	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					3. Lomba Masak Serba Ikan	Terlaksananya Lomba Masak di Kab dan Propinsi (Kali)	5 kali	1	25.050.090	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000	1	30.000.000	5	139.050.090	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
					4. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Kali)	1 Kali			1	27.500.000	1	30.000.000	1	32.500.000	1	35.000.000	4	125.000.000	Dinas Perikanan	
					5. Pengembangan SDM, pengolahan dan peningkatan mutu serta pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya SDM dan jumlah tenaga kerja yang dibina (Kali)	10 kali	1	25.000.000	2	60.000.000	1	150.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	8	380.000.000	Dinas Perikanan	Kab. Sinjai
						Jumlah Total				3.566.076.725		6.811.162.000		6.123.662.000		.089.162.000		6.968.662.000		29.558.724.725	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel-7.1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	Target Capai setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Layanan Urusan Pilihan							
	Kelautan dan Perikanan							
1	Kontribusi PDRB terhadap sektor kelautan dan perikanan	19,38	20,35	21,37	22,44	23,56	24,74	112,46
2	Volume produksi perikanan (Ton)	64.278	78.818	80.047	85.416	88.430	92.074	424.785
3	Konsumsi Ikan per Kapita (Kg/kap/Thn)	47	47	47	47	48	48	48
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	16,77	17,11	17,45	17,79	18,14	18,50	88,99
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	21,55	21,98	22,41	22,85	23,31	23,78	114,33
6	Jumlah Produk Hasil olahan Perikanan (Ton)	1.420	1.448	1.476	1.505	1.535	1.565	7.529

Definisi Operasional dalam penentuan Indikator Kinerja

Tujuan Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

1. **Produksi Perikanan Tangkap (ton) :**

- Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi ikan tangkapan hasil laut yang didata melalui TPI dan Non TPI serta hasil tangkapan nelayan di perairan umum darat (sungai, rawa, dan genangan)

2. **Produksi Perikanan Budidaya (ton) :**

- Produksi perikanan budidaya adalah produksi ikan konsumsi yang diusahakan melalui pembudidayaan yang berasal dari kolam, karamba, mina padi, dan tambak

3. **Angka Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun (kg/kapita/tahun) :**

- Angka Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun (kg/kapita/tahun) dihitung melalui data Susenas yang dilakukan oleh BPS dan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (data T – 1)

Definisi Operasional dalam penentuan Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Cakupan bina kelompok nelayan

Perhitungan cakupan kelompok nelayan adalah sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Bina Kelompok Nelayan} = \frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun } n}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$$

2. Produksi perikanan kelompok nelayan

Perhitungan produksi perikanan kelompok nelayan adalah sebagai berikut :

$$\text{Produksi Perikanan Kelompok Nelayan} = \frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton) Kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan didaerah}} \times 100 \%$$

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN,

Drh. H. AMINUDDIN ZAINUDDIN, MM